

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadi, Sutrisno.,1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Harsono, Boedi., 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta
- Hartono, C.F.G., Suparyati, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, PT.Alumni, Bandung
- Hutagalung, Arie S., 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta
- Mahmud Marzuki, Peter., 2006 “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno.,1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nasution, S., 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Cetakan Keenam, PT Bumi Aksara, Jakarta
- ND,Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta
- Parlindungan A.P., 1991, *(Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 1989, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
- Perangin, Effendi., 1989, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta

Rubaie, Achmad., 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia, Malang

Santoso, Urip ., 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta

_____., 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta

Soekanto, Soerjono., 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo.,1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soetikno, Imam ., 1994, *Proses terjadinya UUPA;Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gajah Mada*, University Press, Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1965 tentang Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan kebijaksanaan selanjutnya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Endit Kuncahyono, 2017, “Legalitas Sita Tanah Milik Perseroan Terbatas saat Negara Darurat Militer Tahun 1966 (Studi Hukum Kritis: Hak Menguasai Negara atas Inbreng di PT.PP Berdikari)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

M.A Aniendita P.S, 2019, “Fasilitas Sosial Yang Dibangun Di Atas Tanah Yang Diakui Oleh Pemegang Hak Pakai Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Effendi Syahputra, 2016, “Pelaksanaan Permohonan Hak Atas Tanah oleh Pemegang Hak Utama yang berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kota Batam Kepulauan Riau”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Donna O. Setiabudhi, 2014, "Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Penguasaan Tanah Negara", *Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado

D. Internet

Sovia, "Prosedur Permohonan Hak Pengelolaan Tanah Negara", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt580d7be6bfc8f/prosedur-permohonan-hak-pengelolaan-tanah-negara/>, diakses pada 31 Juli 2020 pukul 14.10 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/13693/4/9.%20BAB%20II%20%28.pdf>, diakses pada 10 November 2020 pukul 15.27 WIB.